

Implementasi Kebijakan Sekolah Dasar dalam Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum

Nur Iman¹, Nasir Usman¹, Bahrun¹

¹Administrasi Pendidikan-Universitas Syiah Kuala

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 10-10-2020

Disetujui: 14-02-2020

Kata kunci:

policy implementation;
minimum competency assessment;
primary school;
implementasi kebiijakan;
asesmen kompetensi minimum;
sekolah dasar

ABSTRAK

Abstract: To face the minimum competency assessment, preparation is needed by the school and teachers. This study aims to determine the implementation of school policies in preparing students to face the minimum competency assessment at the Elementary School 1 Peukan Pidie. The method used is a qualitative method with a descriptive approach and data obtained from observations, interviews, and documentation studies. The study results indicate that the minimum competency assessment is still a new thing for schools and teachers. Implementation of policies related to minimum competency assessment by the Elementary School 1 Peukan Pidie provides books to support minimum competency assessment and increase student learning hours. However, this policy cannot be implemented optimally due to the Covid-19 pandemic. Factors supporting the policy at the Elementary School 1 Peukan Pidie are the support and proactive attitude of the principal and the availability of supporting books for teachers and students.

Abstrak: Untuk menghadapi asesmen tersebut tentunya diperlukan persiapan oleh sekolah dan guru agar siswa dapat mengikuti asesmen dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan sekolah dalam mempersiapkan siswa menghadapi asesmen kompetensi minimum di Sekolah Dasar Negeri 1 Peukan Pidie. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen kompetensi minimum masih menjadi hal yang baru bagi sekolah dan guru. Implementasi kebijakan terkait asesmen kompetensi minimum oleh SD Negeri 1 Peukan Pidie berupa penyediaan buku penunjang asesmen kompetensi minimum dan penambahan jam belajar siswa. Namun kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan maksimal karena kondisi pandemi covid-19. Faktor pendukung kebijakan di SD Negeri 1 Peukan Pidie adalah dukungan dan sikap proaktif kepala sekolah dan tersedianya buku penunjang untuk guru dan siswa.

Alamat Korespondensi:

Nur Iman
Administrasi Pendidikan
Univeristas Syiah Kuala Banda Aceh
Darussalam Banda Aceh-Aceh
E-mail: nuriman.faisal85@gmail.com

Pendidikan merupakan usaha dalam membina dan mengembangkan harkat martabat manusia secara utuh, menyeluruh, menarik, menyenangkan, dan menggembirakan. UNESCO merumuskan empat pilar pendidikan, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* (Yusuf, 2015). Keempat konsep ini mengindikasikan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari diri individu dan kehidupan sehingga individu sebagai produk pendidikan harus mampu mengembangkan diri sepenuhnya dan mampu hidup dalam masyarakat global yang penuh kompetisi dan dinamika. Sejalan dengan itu, fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk “mengembangkan kemampuan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan mulia tersebut, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mencanangkan program baru yang disebut “merdeka belajar” (Izza, Falah, & Susilawati, 2020).

Salah satu poin dalam merdeka belajar adalah keputusan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional berakhir pada tahun 2020. Ujian Nasional diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan survei karakter yang akan diimplementasikan pada tahun 2021. Pengembangan asesmen kompetensi minimum didasarkan padan kombinasi *antara Programme for International Student Assessment (PISA)* dengan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* (Anas, Muchson, Sugiono, & Forijati, 2021; Rosyidi, 2020). Secara garis besar ada empat hal yang menjadi sasaran utama program merdeka belajar era Nadiem

Makarim yaitu, Ujian Sekolah Standar Nasional (USBN) akan diganti dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah; Ujian Nasional diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter; Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP, dan terakhir membuat kebijakan PPDB zonasi lebih fleksibel (Kemendikbud, 2019). Terkait hal itu, Rohmad (2020) menyatakan bahwa kebijakan merdeka belajar telah mempengaruhi kewenangan guru di sekolah, di mana kewenangan guru terhadap kelulusan siswa meningkat. Dengan menggunakan model USBN yang baru maka kewenangan guru meningkat karena kelulusan siswa diserahkan kepada guru dan sekolah, kemudian dengan menggunakan Penilaian Kompetensi Minimum dan Survei Karakter diharapkan mampu menciptakan sistem evaluasi yang berwibawa tanpa curang. Demikian pula dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sederhana dapat memberikan waktu yang luas bagi guru bersama siswa, dan meningkatkan kewenangan guru. Terakhir, sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengurangi persentase garis zonasi memang belum secara langsung terkait dengan kewenangan guru, namun dapat membuat persaingan akademik siswa semakin meningkat.

Dalam buku panduan asesmen kompetensi minimum yang diterbitkan oleh Pusmenjar dinyatakan bahwa “Asesmen baru ini dirancang khusus untuk memetakan mutu pendidikan secara nasional” (Pusmenjar Kemdikbud, 2021; Yulindari & Hadi, 2020). Ada dua kompetensi yang dijadikan fokus, yaitu kompetensi bernalar tentang teks atau literasi dan angka/numerasi. Asesmen kompetensi ini dimaksudkan untuk mengukur kompetensi bernalar siswa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks, baik personal maupun profesional (pekerjaan)”. Asesmen kompetensi ini direncanakan dilakukan pada siswa yang duduk di pertengahan jenjang sekolah yaitu kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Mekanisme asesmen dalam pelaksanaannya tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi. Hal tersebut dimaksudkan karena selama ini secara nasional data pendidikan berupa data kognitif sehingga data survei karakter diperlukan sebagai tolak ukur agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang dapat membuat siswa lebih bahagia dan lebih kuat dalam memahami dan menerapkan asas Pancasila. Adapun literasi yang dimaksud dalam asesmen bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan, dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Kemudian kompetensi numerasi yang dimaksud berupa kemampuan menganalisis menggunakan angka (Kemendikbud, 2019a).

Asesmen merupakan bagian integral dari pembelajaran dan merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan data atau informasi dari peserta didik mengenai apa yang diketahui atau tidaknya setelah memperoleh materi pelajaran di sekolah dengan menggunakan multiteknik dan multisumber yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Manurung, Hasanah, & Siswanto, 2020; Setiawan, Sa’dijah, & Akbar, 2017). Secara konseptual, model asesmen kompetensi minimum merujuk pada model asesmen PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang tidak hanya menilai apakah siswa dapat mereproduksi pengetahuan, tetapi juga apakah mereka dapat mengekstrapolasi dari apa yang telah mereka pelajari dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi baru. Artinya “model asesmen kompetensi minimum lebih menekankan penguasaan proses, pemahaman konsep, dan kemampuan untuk memfungsikan dalam berbagai jenis situasi” (OECD, 2019). Langkah kerja sama itu diambil agar asesmen memiliki kualitas yang baik dan setara dengan kualitas internasional dengan tetap mengutamakan kearifan lokal (Kemendikbud, 2019). Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang baik oleh lembaga pendidikan dan guru untuk menghadapi model asesmen ini, baik itu berupa kebijakan sekolah maupun strategi pembelajaran oleh guru. Respons guru dan sekolah menjadi sesuatu yang penting karena Ujian Nasional yang selama ini dijadikan tolak ukur telah dihapuskan sehingga sekolah dan guru harus mampu menyiapkan siswa menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum. Baik itu dengan kebijakan sekolah maupun dengan pengelolaan pembelajaran agar hasil belajar siswa menjadi semakin meningkat dan sesuai dengan model asesmen yang diberlakukan.

Lingkungan sekolah dan guru menjadi kunci bagi siswa untuk menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum. Guru dan cara mengajar atau mengelola pembelajaran sangatlah terkait karena guru yang efektif adalah mereka yang mempraktikkan pengajaran yang lebih efektif dan dapat meningkatkan minat belajar dan sekaligus hasil belajar siswa. Tanpa guru yang berkualitas dan terstandarisasi, tujuan pendidikan suatu bangsa akan sulit tercapai karena diyakini bahwa guru yang memiliki kontak langsung dan intensif dengan siswa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran dan kinerja siswa (Anggraeni & Rachmajanti, 2020). Slater dalam (Aditomo & Köhler, 2020) menunjukkan bahwa “efek guru terhadap siswa sangat ditentukan oleh apa yang guru tersebut lakukan di dalam kelas mereka ketika mengajar. Artinya, pengaruh guru terhadap siswa lebih besar dipengaruhi oleh cara mengajar guru bukan oleh latar belakang, pengalaman, dan kualifikasi guru tersebut”. Kemudian Blazar dan Kraft (Blazar & Kraft, 2017) mengatakan bahwa “praktik pengajaran tertentu yang dipilih oleh seorang guru dapat menjelaskan mengapa beberapa guru lebih efektif daripada yang lain”. Hal ini juga berarti kesiapan siswa mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum juga dipengaruhi oleh cara guru mengelola kelas dan pembelajaran, dan cara guru mengelola pembelajaran juga akan dipengaruhi oleh kebijakan sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebijakan sekolah untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September—Oktober 2021.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang aktif yang mempunyai kebebasan kemauan yang perilakunya hanya dapat dipahami dalam konteks budayanya. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk membuat generalisasi, melainkan mengeksplorasi. Wagiran (2019) menyatakan bahwa penelitian

kualitatif bertitik tolak pada paradigma fenomenologi yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi kebijakan sekolah dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran spesifik tentang sebuah situasi, *setting* sosial, atau suatu hubungan. "Hasil dari studi deskriptif ini berupa adalah gambaran rinci tentang subjek penelitian" (Neuman, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Peukan Pidie Kabupaten Pidie. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan pengawas Sekolah Dasar Negeri Peukan Pidie. Menurut Arikunto (Arikunto, 2010) "informan atau subjek penelitian merupakan orang atau individu yang akan dituju oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dicari dalam penelitian". Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis model Miles & Huberman (1994) yaitu model analisis yang terbagi ke dalam beberapa tahap mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini, maka proses analisis telah dimulai sejak pengumpulan data dilakukan.

HASIL

Kebijakan dalam Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen kompetensi minimum sudah diketahui oleh pihak sekolah. Namun, pelaksanaan asesmen kompetensi minimum tersebut dianggap bukan sebagai pengganti ujian nasional, tetapi asesmen yang ditujukan untuk mengetahui pencapaian mutu satuan pendidikan. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala SD Negeri 1 Peukan Pidie, yaitu:

Asesmen kompetensi minimum sebenarnya bukan sebagai pengganti ujian nasional. Asesmen kompetensi minimum itu merupakan sebuah kebijakan untuk mengetahui capaian mutu pendidikan secara keseluruhan, terutama untuk daerah kita provinsi Aceh dan secara nasional. Kalau ujian nasional itu lebih mengarah kepada pencapaian kompetensi siswa dalam menerima pembelajaran selama enam tahun di Sekolah Dasar (Wawancara, Mei 2021).

Terkait program dan kebijakan sekolah dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, kepala sekolah telah melakukan perencanaan yaitu dengan memberikan jam tambahan kepada siswa yang akan menghadapi asesmen kompetensi minimum. Penjelasan mengenai penambahan jam belajar siswa tersebut di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala SD Negeri 1 Peukan Pidie, yaitu:

Persiapan yang telah saya lakukan di sekolah untuk menghadapi asesmen kompetensi minimum yaitu saya, wakil kepala, bandara, dan wakil kurikulum mengadakan rapat guru dan kemudian menyampaikan sedikit tentang asesmen kompetensi minimum kepada para guru. Kemudian kami melakukan perencanaan pelaksanaan apa yang harus kami hadapi perencanaan tersebut salah satunya memberikan tambahan jam pelajaran kepada siswa yang akan melakukan ujian kompetensi minimum ini (Wawancara, Mei 2021).

Pernyataan kepala sekolah tersebut di atas juga dibenarkan oleh waka kurikulum SD Negeri 1 Peukan Pidie, yaitu:

Kami sudah rapat dengan dewan guru. Kami sosialisasikan tentang apa itu asesmen nasional. Dan sesuai arahan kepala sekolah kami akan memberikan tambahan jam pelajaran kepada siswa kelas empat dan lima yang akan mengikuti asesmen. Karena di dulu beritanya yang mengikuti asesmen ini kelas empat dan lima, tapi kalau sekarang kan hanya kelas lima. Jadi tambahan jam belajar kami jadwalkan hanya untuk kelas lima saja (Wawancara, Mei 2020).

Program penambahan jam belajar siswa juga dibenarkan oleh salah seorang guru SD Negeri 1 Peukan Pidie yang peneliti wawancarai, yaitu:

Waktu itu ada rapat yang membahas tentang asesmen, kalau tidak salah waktu awal-awal sebelum *corona*. Kalau tidak salah waktu itu asesmen direncanakan bulan September, tapi katanya ditunda..... hasil rapatnya ada jam tambahan untuk siswa yang ikut AKM, terus diinformasikan juga kalau sekolah sudah membeli buku tentang AKM jadi guru bisa memakai buku itu untuk penunjang (Wawancara, Mei 2020).

Selain kebijakan penambahan jam pelajaran, kebijakan lain yang juga dilakukan oleh sekolah adalah menyediakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan model asesmen kompetensi minimum yaitu dalam bentuk pembelian buku penunjang siswa. Hal tersebut disampaikan oleh waka kurikulum SD Negeri 1 Peukan Pidie bahwa:

Selain memberikan jam tambahan untuk siswa, sekolah kami juga sudah membeli buku penunjang untuk siswa yang berisi soal-soal yang sesuai dengan AKM. Buku-buku ini kami bagikan kepada guru, bukan hanya guru kelas 5 tapi semua guru agar guru juga bisa mempelajari soal-soal model asesmen kompetensi minimum.

Pernyataan waka kurikulum tersebut juga dibenarkan oleh salah seorang guru yang mengatakan bahwa “di perpustakaan sekolah sudah tersedia buku penunjang siswa untuk AKM”. Senada dengan hasil wawancara tersebut, pengawas SD Negeri 1 Peukan Pidie juga menyampaikan bahwa sudah ada perencanaan yang dilakukan oleh SD Negeri Peukan Pidie. Pengawas menyampaikan:

Kalau di dalam wilayah saya itu termasuk salah satunya itu SD Negri 1 Pekan Pidie itu memang jauh-jauh hari sudah membuat kebijakan.... Guru itu tidak fokus hanya pada buku pembelajaran akan tetapi bisa menggunakan dari sumber yang lain sehingga siswa itu bukan hanya menjawab soal, tetapi dia memahami apa yang dia terima dari pembelajaran tersebut... jadi kebijakan yang kami buat itu membuat penambahan jam belajar.

Hasil wawancara dengan pengawas di atas menginformasikan bahwa SD Negeri Peukan Pidie memang sudah memiliki program yang terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Program tersebut direncanakan oleh kepala sekolah dengan melibatkan guru dan pengawas. Dari beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa program dan kebijakan yang dilakukan oleh SD Negeri 1 Peukan Pidie dalam rangka mempersiapkan siswa untuk menghadapi asesmen kompetensi minimum (1) menambah jam pelajaran siswa bagi siswa yang akan mengikuti asesmen dan (2) menyediakan buku penunjang yang sesuai dengan model asesmen yang akan dihadapi.

Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menginformasikan bahwa implementasi kebijakan sekolah dalam mempersiapkan siswa menghadapi asesmen kompetensi minimum di SD Negeri 1 Peukan Pidie dilakukan sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Hal pertama yang dilakukan oleh sekolah adalah menambah jam belajar siswa dalam bentuk les sore. Les sore ini dilakukan sebagai upaya sekolah untuk membimbing siswa agar memiliki bekal untuk menghadapi asesmen. Les sore tersebut didukung dengan penyediaan buku yang berisi soal-soal penunjang asesmen untuk siswa maupun buku pegangan untuk guru. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan waka kurikulum, yaitu: “untuk implementasi terhadap siswa pihak sekolah mengadakan buku yang berisi soal-soal penunjang AKM dan melakukan bimbingan pada siswa dalam rangka menyukseskan program AKM dengan mengadakan les di sore hari”. Pernyataan waka kurikulum tersebut didukung oleh pernyataan Kepala SD Negeri 1 Peukan Pidie yang mengatakan:

Strategi yang sudah saya jalankan yaitu kami melakukan tambahan jam pelajaran. Saya sudah memberikan arahan kepada guru untuk menambah jam belajar siswa dalam bentuk les sore. Kami juga memberikan pemahaman dasar kepada guru yang menghadapi siswa-siswa yang akan mengikuti kompetisi minimum ini kemudian strategi lainnya kita menyediakan buku-buku yang mendukung asesmen kompetensi minimum ini (Wawancara, Mei 2021).

Implementasi kebijakan tersebut di atas tidak berlangsung lama karena ketika pandemi covid-19 melanda, asesmen kompetensi minimum yang pada awalnya direncanakan dilaksanakan pada bulan September 2019 harus ditunda hingga bulan Maret 2021. Karena pandemi belum juga terkendali, asesmen kembali ditunda dan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2021 mendatang. Akibat pandemi covid-19 tersebut implementasi kebijakan menghadapi asesmen kompetensi minimum di SD Negeri 1 Peukan Pidie juga dihentikan karena sistem pembelajaran masa pandemi dilaksanakan secara daring dan selang beberapa bulan kemudian, baru dilanjutkan kembali dengan tatap muka sesuai protokol kesehatan. Ketika pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan pada semester dua tahun ajaran 2020/2021 pihak sekolah dan guru lebih fokus melaksanakan kegiatan belajar masa pandemi dan berusaha mengejar ketertinggalan pelajaran siswa akibat pandemi. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan waka kurikulum SD Negeri 1 Peukan Pidie, yaitu:

Dulu les sore sudah sempat kami lakukan, buku-buku yang sudah dibeli juga sudah kami bagikan kepada guru yang mengajar di kelas lima, tapi sejak belajar daring sampai sekarang kami lebih fokus dengan protokol kesehatan. Soalnya masa covid-19 ini kan siswa belajar tidak maksimal jadi kita fokus dulu untuk mengejar ketertinggalan pelajaran siswa.

Hal serupa juga disampaikan oleh kepala SD Negeri 1 Peukan Pidie ketika peneliti bertanya tentang implementasi program jam tambahan mengajar untuk siswa. Kepala SD Negeri 1 Peukan Pidie menyampaikan: “Selama pandemi ini jam tambahan untuk siswa sudah tidak diterapkan, padahal buku sudah dibagikan kepada guru. Karena sekarang kan semua sekolah lagi sibuk sama covid-19 ini”. Penerapan kebijakan dalam bentuk pengadaan buku yang memuat materi asesmen dan penambahan jam belajar di benarkan oleh pengawas SD Negeri Peukan Pidie. Pengawas mengungkapkan:

Kegiatannya dimulai dengan membuat rapat tim dulu yang melibatkan komite sekolah sebagai perwakilan dari wali murid kemudian kepala sekolah dan guru... dan alhamdulillah dengan hasil rapat kami itu kemarin untuk menunjang kegiatan AKM.... kami sudah buat program, yang pertama sekali itu adalah proses bagaimana proses guru itu mengajar menggunakan media-media pembelajaran yang memang sangat sangat-dekat dengan anak sehingga anak dapat memahami apa yang ia pelajari. Kemudian memberikan kegiatan tambahan belajar sore hari dengan menggunakan tenaga pengajar yang kadang-kadang bukan hanya dari kalangan guru dari SD 1 Pekan Pidie.

Selanjutnya, implementasi penambahan jam belajar dalam bentuk les sore untuk siswa yang akan mengikuti asesmen kompetensi minimum juga peneliti konfirmasi kepada beberapa guru SD Negeri 1 Peukan Pidie dan diperoleh informasi bahwa pada masa pandemi covid-19 program les tersebut sudah tidak dilaksanakan. Salah satu guru SD Negeri 1 Peukan Pidie menyampaikan:

“sekarang sudah tidak ada les sore, mungkin kalau situasi sudah normal baru les kembali”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat diketahui bahwa implementasi program yang telah direncanakan SD Negeri 1 Peukan Pidie untuk mempersiapkan siswa menghadapi asesmen kompetensi minimum terkendala oleh kondisi yang tidak kondusif, yaitu kondisi covid-19. Kondisi ini membuat guru tidak dapat melaksanakan pembelajaran seperti masa normal sehingga harus lebih memprioritaskan penerapan protokol kesehatan demi keselamatan siswa. Hasil penelitian menginformasikan bahwa belum ada metode dan strategi khusus yang diterapkan dalam pembelajaran untuk mempersiapkan siswa menghadapi asesmen kompetensi minimum di SD Negeri 1 Peukan Pidie. Adapun hal yang dilakukan oleh guru adalah memberikan soal-soal yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum. Guru SD Negeri 1 Peukan Pidie berusaha membiasakan siswa dengan soal asesmen kompetensi minimum yaitu soal-soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Hal ini disampaikan oleh salah seorang guru SD Negeri 1 Peukan Pidie, yaitu: “membiasakan siswa untuk mengerjakan tipe soal AKM”. Pernyataan guru tersebut dikuatkan oleh pernyataan kepala sekolah yaitu; “Kita lebih kepada mengerjakan soal-soal yang melibatkan interaksi membuat pemahaman lebih terhadap soal AKM”. Tidak adanya metode pembelajaran khusus untuk menghadapi asesmen kompetensi minimum di SDN 1 Pekan Pidie juga dipengaruhi oleh belum adanya sosialisasi khusus yang diberikan oleh dinas terkait tentang metode pembelajaran yang kompatibel dengan asesmen kompetensi minimum. Demikian pula dengan pelatihan tentang asesmen kompetensi minimum untuk guru juga belum pernah diterima oleh guru SD Negeri 1 Peukan Pidie. Hal ini disampaikan oleh salah seorang guru SD Negeri 1 Peukan Pidie yang mengatakan; “saya pribadi belum pernah mendapatkan sosialisasi khusus tentang AKM. Pelatihan juga belum pernah”. Pengakuan guru tersebut di atas terkonfirmasi dari pernyataan waka kurikulum, yaitu:

Kami belum merencanakan metode khusus, karena sosialisasi khusus mengenai AKM juga belum pernah kami dapatkan, yang ada hanya yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah. Sehingga dengan pemahaman saya yang terbatas mengenai AKM saya belum merancang strategi maupun, juga membuat kebijakan khusus untuk itu.... Tidak ada metode pembelajaran khusus untuk AKM karena belum diterapkan.

Lebih lanjut, Waka Kurikulum juga menambahkan, yaitu:

....strategi pembelajaran secara khusus itu belum ada karena sosialisasi ke sekolah itu kan belum jelas dan sosialisasi ke sekolah belum ada, pengadaan buku pun dilakukan karena ada satu orang yang mewakili. Jadi tidak ada strategi khusus, guru selama ini ya baca-baca saja.

Keterangan dari waka kurikulum tersebut dibenarkan oleh salah satu guru SD Negeri 1 Peukan Pidie yang mengatakan bahwa; “kalau untuk AKM, selama ini kami hanya baca-baca saja, jadi sedikit banyaknya kami tahulah tentang AKM itu”. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam hal metode pembelajaran, sekolah maupun guru SD Negeri 1 Peukan Pidie belum merencanakan strategi dan metode secara khusus dalam rangka mempersiapkan siswa mengikuti asesmen kompetensi minimum. Namun, kegiatan pembelajaran yang kemudian dilaksanakan sudah mulai membahas soal yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum. Hal ini karena SD Negeri 1 Peukan Pidie sudah memiliki buku yang memuat soal-soal yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum. Jadi meskipun guru belum merancang strategi dan metode pembelajaran khusus yang menyangkut dengan asesmen kompetensi minimum, namun dengan bekal pengetahuan yang dimilikinya, para guru di SD Negeri 1 Peukan Pidie tetap berusaha mengontekstualisasikan kegiatan pembelajaran dengan asesmen kompetensi minimum.

Dalam hal evaluasi dan penilaian, guru SDIT Ibnu Mas'ud juga menyelenggarakan penilaian pembelajaran yang didominasi oleh bentuk instrumen tertulis. Tapi guru SDIT Ibnu Mas'ud lebih banyak menggunakan lembar kerja siswa (LKS) yang sudah terstandarisasi oleh kelompok kerja guru. Pengerjaannya di rumah dibimbing oleh orang tua siswa, sebagaimana disampaikan oleh dua orang Guru SDIT Ibnu Mas'ud sebagai berikut:

“... evaluasi kami lakukan dengan memberikan LK pada setiap akhir materi dari sub tema...”

“Siswa diminta keaktifannya dalam mengerjakan LK kalau materinya sudah disampaikan oleh guru... Orangtua ikut membimbing...”

Sementara itu, ada juga guru yang melaksanakan penilaian pembelajaran secara daring. Soal-soal disampaikan via aplikasi *WhatsApp* yang membutuhkan jawaban tertulis di mana proses pengerjaannya juga dibimbing oleh orang tua siswa, sebagaimana dinyatakan Guru SDIT Ibnu Mas'ud, yaitu:

“Evaluasi saya lakukan secara daring. Instrumen berupa soal tertulis juga saya kirim melalui *WhatsApp* grup setiap hari... nanti hasil evaluasi akan saya minta dikumpulkan setiap seminggu sekali. Evaluasi yang saya lakukan mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan...”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses evaluasi selalu dilakukan oleh guru. Dan evaluasi yang dilakukan oleh guru di SDIT Ibnu Mas’ud terkait langsung dengan peran orang tua siswa. Hal ini berarti pula bahwa komunikasi yang baik juga memengaruhi evaluasi yang dilakukan oleh guru SDIT Ibnu Mas’ud karena semua prosesnya melibatkan peran aktif orang tua siswa.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai asesmen kompetensi minimum di SD Negeri 1 Peukan Pidie didukung oleh sikap proaktif kepala sekolah yang menyediakan fasilitas belajar untuk guru dan siswa yang berupa buku pendukung untuk guru dan siswa. Hal ini disampaikan oleh salah seorang guru, yaitu:

Kalau faktor pendukung di sekolah kami salah satunya sudah ada buku guru dan buku siswa yang sesuai dengan AKM. Buku sudah dibagikan kepada kami dan siswa, dengan buku ini kami bisa mempelajari soal-soal model literasi dan numerasi. Jadi siswa juga bisa kami ajarkan. Intinya ada panduan jadi lebih mudah.

Pembelian buku yang memuat tentang soal-soal asesmen kompetensi minimum untuk guru dan siswa sebagai faktor pendukung sekolah dan guru dalam menyiapkan siswa dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum juga diakui oleh Kepala SD Negeri 1 Peukan Pidie. Ia mengatakan:

Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami sudah membeli buku. Buku tentang AKM ini sangat membantu guru. Jadi kalau faktor pendukung ya salah satunya dengan adanya buku itu guru bisa mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan AKM. Jadi guru ketika mengajar juga sudah ada bekal. Intinya buku ini menjadi faktor pendukung utama untuk guru, begitu juga dengan siswa.

Wawancara di atas juga dibenarkan oleh waka kurikulum SD Negeri 1 Peukan Pidie yang menyatakan bahwa “buku AKM yang sudah dibeli oleh sekolah menjadi faktor pendukung untuk menghadapi AKM yang akan datang. Selain ketersediaan buku, faktor lain yang menjadi pendukung adalah kesiapan sekolah dalam menyediakan fasilitas pembelajaran untuk guru dan siswa. Kepala SD Negeri 1 Peukan Pidie menambahkan:

Kalau faktor pendukung lain saya rasa itu kan kesiapan-kesiapan kita menyediakan fasilitas-fasilitas kepada guru dan siswa. Ya seperti menyediakan buku-buku untuk siswa yang mungkin tidak semua sekolah sudah menyiapkan. Kemudian yang kedua kita memiliki guru-guru yang memang bisa memahami dan bisa berbagi dengan para siswa tentang metode-metode penyelesaian soal yang baik.

Kesiapan kepala sekolah SD Negeri 1 Peukan Pidie dalam menyediakan fasilitas belajar seperti buku asesmen kompetensi minimum memang layak untuk di apresiasi karena dari beberapa sekolah dasar yang ada di Kabupaten Pidie berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan hanya SD Negeri 1 Peukan Pidie yang sudah siap dengan buku tersebut. Sebagai perbandingan disekolah lain seperti di SD Negeri 2 Tijue, buku tersebut memang belum ada. Begitu pula dengan sekolah dasar lainnya yang sempat peneliti tanyakan kepada guru-guru yang punya kolega mengajar disekolah lain di Kabupaten Pidie yang menyatakan bahwa di sekolah lain memang belum ada buku yang secara khusus dibeli untuk mempersiapkan siswa menghadapi asesmen kompetensi minimum seperti yang dilakukan oleh SD Negeri 1 Peukan Pidie.

Selain faktor pendukung seperti yang telah dipaparkan di atas, ada pula faktor penghambat dalam hal mempersiapkan siswa menghadapi asesmen kompetensi minimum. Kepala sekolah, wakil kepala dan guru pada dasarnya telah merencanakan pemberian jam tambahan pada siswa yang akan menghadapi asesmen. Namun, kondisi covid-19 telah membuat sekolah gagal merealisasikan program dan kebijakan penambahan jam pelajaran. Pada sama covid-19 sekolah harus menyesuaikan kondisi pembelajaran sehingga tidak dapat melanjutkan program tersebut.

Dalam konteks covid-19, maka yang menjadi faktor utama bagi guru dan sekolah dalam mempersiapkan siswa menghadapi asesmen kompetensi minimum adalah kondisi pandemi itu sendiri. Karena pandemi covid-19 ini telah mengubah semua kegiatan pendidikan. Pada awal pandemi, siswa harus belajar daring, dan kemudian belajar tatap muka secara terbatas. Kondisi ini membutuhkan penyesuaian-penyesuaian sehingga program dan kebijakan sekolah tentang asesmen kompetensi minimum tidak menjadi skala prioritas. Hal ini disampaikan oleh kepala SD Negeri 1 Peukan Pidie, yaitu selama covid-19 ini kami lebih fokus bagaimana caranya agar siswa tetap dapat belajar, dan guru tetap dapat mengajar. Jadi prioritas kami masih pada mengatasi kendala pembelajaran masa covid-19. Untuk AKM kami belum memprioritaskannya kembali. Faktor penghambat lainnya juga diungkapkan oleh Pengawas SD Negeri 1 Peukan Pidie. Pengawas mengatakan:

Kalau faktor penghambat banyak sekali sebenarnya... anak-anak semuanya menggunakan media belajar yang berupa teknologi... menggunakan media pembelajaran dengan IT. Itu hambatan yang pertama sekali karena jangankan anak-anak, kadang-kadang guru sendiri masih harus banyak belajar untuk bisa menggunakan IT.

Penjelasan pengawas tersebut menginformasikan bahwa kegiatan belajar mengajar dalam pembelajaran siswa yang berbasis pada teknologi masih terkendala oleh minimnya kemampuan menggunakan perangkat teknologi. Minimnya kemampuan tersebut tidak hanya terjadi pada siswa, namun juga terjadi pada guru sehingga diperlukan peningkatan kompetensi guru dan siswa dalam penggunaan media pembelajaran yang berbasis pada teknologi tersebut. Selanjutnya, Faktor penghambat lain yang juga dialami oleh SD Negeri 1 Peukan Pidie adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan dinas terkait tentang asesmen kompetensi minimum yang akan dilaksanakan. Pelatihan mengenai asesmen kompetensi minimum juga belum pernah dilakukan maupun diterima, baik oleh kepala sekolah maupun oleh dewan guru. Sosialisasi yang minim ini mengakibatkan kejelasan dan keakuratan informasi mengenai asesmen yang diterima oleh kepala sekolah dan guru juga tidak dapat terjamin. Kurangnya sosialisasi dari dinas terkait tentang pelaksanaan asesmen kompetensi minimum tersebut mengakibatkan kebingungan pada guru. Solusinya kemudian adalah guru maupun kepala sekolah mencari informasi mengenai asesmen kompetensi minimum secara mandiri. Penjelasan tersebut di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 1 Peukan Pidie, yaitu:

Faktor penghambat pasti ada yang pertama kan rasanya masih kurang sosialisasi dari pemerintah sehingga asesmen kompetensi minimum ini tidak dipahami secara menyeluruh oleh para guru. Kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah pusat maupun daerah ada kebingungan para guru tentang asesmen kompetensi minimum ini.

Pernyataan di atas juga dikonfirmasi kebenarannya oleh Kadisdik Kabupaten Pidie bahwa saat ini memang belum ada sosialisasi secara menyeluruh tentang mekanisme asesmen kompetensi minimum. Sosialisasi yang dilakukan ke sekolah juga masih terbatas. Kadisdik Kabupaten Pidie yaitu untuk sosialisasi memang belum semua sekolah. Pelatihan juga belum dilaksanakan, tapi mata pelajaran apa saja yang akan dilaksanakan oleh guru terkait AKM ini kita akan panggil guru untuk melakukan latihan apakah itu melalaui MGMP atau melalui KKG". Pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten tersebut juga dibenarkan oleh sekretaris dinas pendidikan yang mengatakan: "memang belum semua sekolah kami sosialisasikan, baru beberapa saja karena level nasional juga baru tahap sosialisasi".

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum

Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan program baru yang telah direncanakan akan dilaksanakan sejak tahun 2020. Kondisi pandemi covid-19 kemudian memaksa pelaksanaan asesmen tersebut ditunda dan akan dilaksanakan pada bulan September 2020. Namun hingga pertengahan tahun 2020 pandemi covid-19 tidak kunjung usai sehingga pelaksanaan asesmen kompetensi minimum kembali ditunda hingga bulan Maret 2021. Awal tahun 2021 kementerian pendidikan telah menyusun jadwal pelaksanaan asesmen, namun kembali harus ditunda karena pandemi covid-19 masih belum dapat teratasi. Sehingga pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dijadwalkan kembali pada bulan September—Oktober 2021. Pengunduran jadwal Asesmen ini disampaikan Mendikbud dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI secara virtual (ditpsd.kemdikbud.go.id 2021). Berdasarkan informasi itu dapat diketahui bahwa pada dasarnya asesmen kompetensi minimum sudah direncanakan sejak lama sehingga normalnya sekolah sudah mengetahui informasi tentang akan dilaksanakannya asesmen tersebut pada satuan pendidikan. Dengan perencanaan pelaksanaan yang telah tertunda hingga satu tahun ke belakang tersebut maka hal itu memberikan waktu yang cukup lama bagi sekolah untuk mempersiapkan guru dan siswanya dalam menghadapi asesmen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan SD Negeri 1 Peukan Pidie dengan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh sikap proaktif kepala sekolah dalam memimpin satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari sisi persiapan, SD Negeri 1 Peukan Pidie menunjukkan bahwa sekolah mereka sudah siap merespons kebijakan baru pengganti ujian nasional tersebut. Persiapan yang dilakukan dengan menyediakan buku penunjang yang berisi soal-soal asesmen kompetensi minimum serta memberikan alokasi tambahan waktu belajar bagi siswa yang akan mengikuti asesmen mengindikasikan bahwa SD Negeri 1 Peukan Pidie telah mengetahui dengan baik asesmen kompetensi minimum tersebut. Program pengadaan buku dan kebijakan penambahan jam belajar untuk siswa tentu merupakan hal yang penting. Karena asesmen kompetensi minimum yang akan dilaksanakan pada jenjang pendidikan di sekolah dasar merupakan hal baru bagi siswa.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam asesmen kompetensi minimum terdapat dua hal penting yang akan diujikan pada siswa, yaitu literasi dan numerasi. Pengertian literasi yang dimaksud menurut Faizah et al. (2016) adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara. Sementara itu, numerasi menurut Jonas (2018) merupakan kemampuan untuk mengakses, menggunakan, menafsirkan, dan mengomunikasikan informasi dan ide matematika, untuk terlibat dalam dan mengelola tuntutan matematika dari berbagai situasi dalam kehidupan dewasa. Kedua aspek tersebut di atas jika tidak dipersiapkan dengan baik oleh guru dan sekolah tentunya akan membuat peserta didik tidak siap. Apabila guru dan sekolah menyiapkan buku dan jam tambahan belajar kepada siswa yang berkaitan dengan asesmen maka besar kemungkinan siswa siap mengikuti asesmen kompetensi minimum. Maka dari itu kebijakan dan program yang direncanakan oleh SD Negeri 1 Peukan Pidie dapat menjadi stimulus bagi guru dan siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi asesmen. Dari buku yang telah disediakan oleh sekolah, guru diharapkan dapat mengajari siswa tentang literasi dan numerasi dalam bentuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi tersebut. Ketika siswa sudah dibiasakan dalam membahas soal, maka siswa pun akan memiliki kesiapan dan kecakapan

dalam menghadapi asesmen. Dan yang lebih penting daripada itu siswa memiliki pemahaman yang baik tentang literasi dan numerasi yang dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka dimasa yang akan datang (Ekowati, Astuti, Utami, Mukhlisina, & Suwandayani, 2019).

Kementerian pendidikan telah mengevaluasi bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Indonesia masih lemah. Hal itu dibuktikan oleh data OECD (2019) bahwa peringkat nilai PISA Indonesia tahun 2018 dalam aspek literasi berada di peringkat 72 dari 77 negara. Kemudian pada aspek numerasi, siswa Indonesia berada pada peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan dalam bidang sains berada pada peringkat 70 dari 78 negara. Rokhim et al. (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa “dalam 10-15 tahun terakhir, nilai Indonesia cenderung stagnan”. Stagnasi hasil asesmen belajar peserta didik di Indonesia jika tidak dipersiapkan tentu akan menambah wajah kegagalan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan dasar. “Nilai TIMSS Indonesia yang dilakukan pada peserta didik kelas 4 tahun 2015 berada pada peringkat ke 44 dari 49 negara pada aspek matematika dan peringkat ke 46 dari 49 negara pada aspek sains” (Rokhim et al., 2021).

Berkenaan dengan kebijakan sekolah di Kabupaten Pidie yang dalam penelitian ini adalah SD Negeri 1 Peukan Pidie, hasil penelusuran literatur yang peneliti lakukan ditemukan bahwa literasi dan numerasi pada level pendidikan dasar bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Kedua istilah ini sudah dikenal sejak lama dalam pendidikan di Indonesia bahkan telah ada gerakan literasi sekolah yang diluncurkan sejak tahun 2016. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yuliandari and Hadi (2020) yang menyatakan bahwa “sebenarnya literasi bukan merupakan hal yang baru di dunia pendidikan kita. Bahkan Kemendikbud telah mengeluarkan Buku Literasi Numerasi pada tahun 2017, yang berjudul Materi Pendukung Literasi Numerasi sebagai pendukung kebijakan literasi nasional yang dikeluarkan pada tahun 2016 silam”.

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa pada dasarnya literasi dan numerasi bukanlah sesuatu yang benar-benar baru di dunia pendidikan di Indonesia, termasuk pada lembaga pendidikan tingkat dasar yaitu gerakan literasi sekolah. “Gerakan Literasi Sekolah menjadi salah satu program utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang penyebarannya mampu memberi dampak masif ke berbagai daerah di Indonesia” (Novarina, Gheanurma Ekahasta; Santoso, 2019). Gerakan ini juga merupakan “sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literasi sepanjang hayat melalui pelibatan publik” (Faizah et al., 2016, p. 62). Diharapkan gerakan tersebut menjadi pendukung keluarga, sekolah, dan masyarakat mulai dari perkotaan sampai ke wilayah terjauh untuk berperan aktif dalam menumbuhkan budaya literasi (Safitri, Marsidin, & Subandi, 2020). Pada tahun 2017 telah diluncurkan buku panduan khusus untuk sekolah dasar tentang bagaimana gerakan literasi sekolah dilaksanakan. Panduan tersebut memberikan petunjuk teknis yang dapat dijadikan rujukan bagi guru dan sekolah tentang literasi numerasi. Berdasarkan penjelasan itu maka seharusnya tidak ada alasan bagi guru dan sekolah untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang asesmen kompetensi minimum maupun tentang literasi dan numerasi. Karena telah banyak informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang asesmen kompetensi minimum, dan literasi numerasi telah terprogram jauh sebelum wacana tentang asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional digulirkan.

Terlepas dari ada itu, pandemi covid-19 telah mempengaruhi semua aktivitas pendidikan, termasuk pada aktivitas pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Pidie. Kehadiran pandemi covid-19 memaksa *stakeholder* pendidikan harus menyesuaikan diri. Sehingga beragam program yang telah direncanakan pada akhirnya harus disesuaikan dengan kondisi pandemi. Termasuk pula dengan implementasi kebijakan sekolah yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum. UNESCO menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 mengancam 577.305.660 pelajar dari pendidikan prasekolah dasar hingga menengah atas dan 86.034.287 pelajar dari pendidikan tinggi di seluruh dunia. Seperti kebijakan yang diambil berbagai negara yang terdampak penyakit covid-19, Indonesia meliburkan seluruh aktivitas Pendidikan (Pujiastuti, 2020). Banyak hal yang berubah di lingkungan sekolah akibat penyebaran virus covid-19 ini. Seperti kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan secara daring maupun tatap muka secara terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Hal ini memberikan efek yang cukup signifikan pada pelaksanaan program pembelajaran yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum. Pada masa pembelajaran daring, guru hanya dapat berinteraksi dengan siswa secara virtual sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif. Demikian pula ketika kegiatan belajar tatap muka dilaksanakan di mana tidak semua siswa hadir dalam kegiatan pembelajar tersebut. Kondisi ini juga mempengaruhi program dan kebijakan sekolah dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi asesmen kompetensi minimum. Utamanya program dan kebijakan SD Negeri 1 Peukan Pidie. Ketika pandemi melanda, SD Negeri 1 Peukan Pidie sudah tidak lagi menjalankan program kelas tambahan bagi siswa yang akan mengikuti asesmen yaitu kelas 5. Hal tersebut di atas dilakukan sebagai usaha sekolah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 dan juga sebagai bentuk kepatuhan sekolah terhadap anjuran pemerintah yang tertuang dalam “Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19”. Hal ini merupakan upaya bersama yang dilakukan untuk menjamin keselamatan guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sekolah dalam mempersiapkan siswa menghadapi asesmen kompetensi minimum di SD Negeri 1 Peukan Pidie dilakukan sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Hal pertama yang dilakukan oleh sekolah adalah menambah jam belajar siswa kelas 4 dan 5 dalam bentuk les sore. Les sore ini dilakukan sebagai upaya sekolah untuk membimbing siswa agar memiliki bekal untuk menghadapi asesmen. Les sore tersebut didukung dengan penyediaan buku yang berisi soal-soal penunjang asesmen untuk siswa. Namun, akibat pandemi covid-19 maka proses

implementasi kebijakan tersebut di atas tidak berlangsung lama karena ketika pandemi covid-19 melanda, asesmen kompetensi minimum yang pada awalnya direncanakan dilaksanakan pada bulan September 2019 harus ditunda hingga bulan Maret 2021. Karena pandemi belum juga terkendali, asesmen kembali ditunda dan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2021 mendatang.

Akibat pandemi covid-19 tersebut implementasi kebijakan dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum di SD Negeri 1 Peukan Pidie juga dihentikan. Karena sistem pembelajaran masa pandemi dilaksanakan secara daring dan kemudian dilanjutkan dengan tatap muka sesuai protokol kesehatan (Abidah, Hidayatullaah, Simamora, Fehabutar, & Mutakinati, 2020). Ketika pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan pada semester dua tahun ajaran 2020/2021 pihak sekolah dan guru lebih fokus melaksanakan kegiatan belajar masa pandemi dan berusaha mengejar ketertinggalan pelajaran siswa akibat pandemi. Kondisi ini tentu sangat beralasan karena secara nasional pandemi covid-19 memang belum bisa diatasi. Maka pilihan tersebut menjadi salah satu solusi. Namun demikian meskipun program tidak dilaksanakan tidak berarti pula bahwa sekolah dan guru tidak melaksanakan kegiatan mengajar. Guru tetap melaksanakan kewajibannya dan siswa tetap harus belajar dengan keterbatasan yang ada. Dalam pembelajaran yang serba terbatas tersebut materi tentang asesmen dapat disisipkan oleh guru. Hal inilah yang dapat dilakukan oleh guru dan sekolah untuk agar tetap dapat mempersiapkan diri menghadapi asesmen kompetensi minimum. Dalam konteks ini semua *stakeholder* pendidikan di SD Negeri 1 Peukan Pidie harus mampu bekerja sama karena dengan kerja sama yang dilakukan maka pembelajaran akan tetap dapat dilaksanakan.

Meskipun kondisi pembelajaran terganggu akibat pandemi covid-19, guru seharusnya tetap memiliki strategi pembelajaran baik itu dalam strategi ketika pembelajaran daring maupun tatap muka. Karena sebagai mana pendapat Uno (2012, p. 3) “strategi pembelajaran adalah cara-cara yang aktif digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran”. Artinya ketika masa pandemi covid-19 guru memiliki strategi pembelajaran yang terencana maka seorang guru akan mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, termasuk dalam mempersiapkan siswa menghadapi asesmen kompetensi minimum. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak efektifnya pembelajaran masa pandemi covid-19 berimplikasi pada tidak dapatnya diterapkan metode pembelajaran yang biasa dipraktikkan oleh guru. Karena pada masa pembelajaran daring yang lebih banyak berperan adalah orang tua sehingga guru disekolah hanya dapat memberikan pengarahan secara terbatas. Kondisi seperti ini membuat metode dan strategi pembelajaran yang efektif seperti yang biasa dilaksanakan di dalam kelas tidak dapat diterapkan.

Tidak adanya metode pembelajaran khusus untuk menghadapi asesmen kompetensi minimum di SDN 1 Pekan Pidie juga dipengaruhi oleh belum adanya sosialisasi khusus yang diberikan oleh dinas terkait tentang metode pembelajaran yang kompatibel dengan asesmen kompetensi minimum. Demikian pula dengan pelatihan tentang asesmen kompetensi minimum untuk guru juga belum pernah diterima oleh guru SD Negeri 1 Peukan Pidie. Namun, jika guru memiliki perencanaan pembelajaran pada masa covid-19, akan tetap ada metode pembelajaran yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah pemanfaatan media pembelajaran. Terkait media pembelajaran Prastowo (2015, p. 259) mengemukakan “bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu baik itu berupa alat, lingkungan, atau kegiatan yang direncanakan atau dikondisikan secara sengaja yang dapat menyalurkan pesan pembelajaran guna terjadinya proses pembelajaran pada siswa sekolah dasar untuk tercapainya tujuan secara efektif dan efisien”. Jika guru SD Negeri 1 Peukan tidak menerapkan strategi dan model pembelajaran yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum maka akan berdampak pada tidak efektifnya kegiatan pembelajaran. Resikonya adalah tidak adanya pemahaman yang baik pada siswa tentang literasi dan numerasi sebagai fokus utama dari asesmen kompetensi minimum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya proses pembelajaran memiliki keterkaitan yang erat antara guru dan siswa. Dalam konteks tersebut Rawung (2019) menegaskan bahwa “seorang guru harus bisa memilih strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan di dalam proses pembelajaran demi tercapainya tujuan Pendidikan”.

Pembelajaran yang dilaksanakan berbasis pada metode dan strategi pembelajaran yang tepat akan berdampak pada lahirnya suasana proses belajar mengajar yang kondusif. Strategi yang sesuai dengan kondisi murid, tugas atau pembelajaran yang diberikan juga sesuai dengan kondisi peserta didik agar antusiasme siswa dalam belajar dapat terjaga (Zahrudin, Ismail, & Yuliati Zakiah, 2021). Bagaimanapun, hasil belajar siswa tidak dapat dicapai secara maksimal jika kondisi dan situasi proses belajar mengajar yang dilaksanakan tidak memberikan ruang dan gerak kepada siswa dalam menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Oleh karena itu, dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum yang akan datang guru harus tetap memiliki strategi dan model pembelajaran yang terencana dan terstruktur agar siswa siap menghadapi asesmen. Sebagaimana yang terlah diungkapkan bahwa dalam hal metode pembelajaran, Sekolah maupun guru SD Negeri 1 Peukan Pidie belum merencanakan strategi dan metode secara khusus dalam rangka mempersiapkan siswa mengikuti asesmen kompetensi minimum. Namun kegiatan pembelajaran yang kemudian dilaksanakan sudah mulai membahas soal yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum. Hal ini terjadi karena SD Negeri 1 Peukan Pidie sudah memiliki buku yang memuat soal-soal yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum. Terkait hal tersebut, dalam kegiatan belajar mengajar disekolah model dan strategi pembelajaran adalah sesuatu yang mutlak. Karena secara konseptual model pembelajaran merupakan acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola pandangan tertentu secara sistematis.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai asesmen kompetensi minimum di SD Negeri 1 Peukan Pidie didukung oleh sikap proaktif kepala sekolah yang menyediakan fasilitas belajar untuk guru dan siswa yang berupa buku pendukung untuk guru dan siswa. Kesiapan kepala sekolah SD Negeri 1 Peukan

Pidie dalam menyediakan fasilitas belajar seperti buku asesmen kompetensi minimum memang layak untuk di apresiasi karena dari beberapa sekolah dasar yang ada di Kabupaten Pidie berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan hanya SD Negeri 1 Peukan Pidie yang sudah siap dengan buku tersebut. Selain faktor pendukung seperti yang telah dipaparkan di atas, ada pula faktor penghambat dalam hal mempersiapkan siswa menghadapi asesmen kompetensi minimum. Kepala sekolah, wakil kepala dan guru pada dasarnya telah merencanakan pemberian jam tambahan pada siswa yang akan menghadapi asesmen. Namun kondisi covid-19 telah membuat sekolah gagal merealisasikan program dan kebijakan penambahan jam pelajaran. Masa covid-19 memaksa sekolah harus menyesuaikan kondisi pembelajaran sehingga tidak dapat melanjutkan program tersebut.

Faktor penghambat lain yang juga dialami oleh SD Negeri 1 Peukan Pidie adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan dinas terkait tentang asesmen kompetensi minimum yang akan dilaksanakan. Pelatihan mengenai asesmen kompetensi minimum juga belum pernah dilakukan maupun diterima, baik oleh kepala sekolah maupun oleh dewan guru. Sosialisasi yang minim ini mengakibatkan kejelasan dan keakuratan informasi mengenai asesmen yang diterima oleh kepala sekolah dan guru juga tidak dapat terjamin. Kurangnya sosialisasi dari dinas terkait tentang pelaksanaan asesmen kompetensi minimum tersebut mengakibatkan kebingungan pada guru. Solusinya kemudian adalah guru maupun kepala sekolah mencari informasi mengenai asesmen kompetensi minimum secara mandiri. Belum adanya sosialisasi yang intensif mengenai asesmen kompetensi minimum ke sekolah maupun guru di akui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie bahwa saat ini memang belum ada sosialisasi secara menyeluruh tentang mekanisme asesmen kompetensi minimum. Sosialisasi yang dilakukan ke sekolah juga masih terbatas. Beberapa hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa belum semua guru mengerti tentang asesmen kompetensi minimum. Salah satunya adalah hasil penelitian Rokhim (Rokhim et al., 2021) terhadap kelompok guru menyatakan bahwa “ baru 75% guru memahami mengenai asesmen nasional dan 25% guru belum memahami mengenai asesmen nasional.

SIMPULAN

Kebijakan tentang asesmen kompetensi minimum merupakan sesuatu yang harus direncanakan dengan baik karena asesmen tersebut bertujuan untuk mengevaluasi lembaga pendidikan bukan mengevaluasi siswa. Jika dalam menghadapi asesmen siswa tidak dibekali dengan pengetahuan yang berkaitan dengan asesmen, maka akan berdampak pula pada hasil yang akan diterima oleh sekolah. Kebijakan sekolah yang terkait dengan persiapan menghadapi asesmen kompetensi minimum masih menjadi hal yang baru bagi sekolah di kabupaten Pidie. Implementasi kebijakan SD Negeri 1 Peukan Pidie tentang asesmen kompetensi minimum adalah penyediaan buku penunjang yang berisi soal-soal yang terkait dengan asesmen kompetensi minimum yaitu soal literasi dan numerasi. Namun kebijakan dan program tersebut tidak dapat diimplementasikan secara baik karena kondisi pandemi covid-19. Meskipun terdapat perencanaan namun belum ada model dan strategi pembelajaran yang berkaitan dengan persiapan menghadapi asesmen kompetensi minimum yang disusun oleh guru SD Negeri 1 Peukan Pidie. Selain covid-19, minimnya informasi tentang asesmen kompetensi minimum menjadi alasan utama bagi guru dan sekolah, mereka belum menyusun model dan strategi pembelajaran yang terkait dengan asesmen kompetensi minimum karena belum mengetahui detail asesmen tersebut.

Faktor pendukung bagi SD Negeri 1 Peukan Pidie dalam mempersiapkan siswa menghadapi asesmen kompetensi minimum adalah dukungan dan sikap proaktif kepala sekolah dan tersedianya buku penunjang untuk guru dan siswa yang memuat soal-soal terkait asesmen kompetensi minimum. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah masa pandemi covid-19 yang membuat sekolah harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran masa pandemi. Implementasi kebijakan akan berjalan sesuai rencana apabila dalam penyusunan program dilakukan dengan melibatkan semua *stakeholder* dan juga mempertimbangkan kondisi sekolah. Meskipun SD Negeri 1 Peukan Pidie memiliki program untuk diimplementasikan namun program tersebut belum direncanakan dengan baik sehingga ketika kondisi berubah dengan adanya pandemi covid-19, program dan kebijakan sulit diterapkan. Namun demikian, secara positif dapat dikatakan bahwa meskipun kondisi pandemi melanda, tetapi fasilitas pendukung asesmen sudah tersedia sehingga guru SD Negeri 1 Peukan Pidie hanya membutuhkan penyesuaian untuk mempersiapkan siswa menghadapi asesmen kompetensi minimum.

Kepala sekolah hendaknya mempersiapkan program dan kebijakan yang terencana agar guru memiliki pedoman dan arahan untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Karena dalam asesmen kompetensi minimum yang dievaluasi bukan siswa sebagaimana ujian nasional, tetapi yang dievaluasi adalah sekolah. Sehingga perencanaan mutlak untuk dilakukan. Kepala sekolah juga hendaknya memberikan arahan kepada guru untuk bersikap proaktif dalam mencari dan menjangkau informasi yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum, sehingga guru tidak hanya bergantung pada surat edaran yang disampaikan ke sekolah, atau hanya mengandalkan sosialisasi pihak terkait dalam memperoleh informasi. Karena perkembangan teknologi sudah sangat pesat sehingga informasi yang tersedia sangat melimpah dan dapat diakses secara terbuka. Semua informasi mengenai asesmen kompetensi minimum telah tersedia dan dapat di akses. Sehingga alasan bahwa guru luput dalam menyusun strategi pembelajaran yang terkait asesmen disebabkan oleh informasi yang langka tidak terjadi. Artinya, jika guru dan kepala sekolah bersikap proaktif maka mereka dapat memperoleh informasi yang komprehensif tentang asesmen kompetensi minimum, bukan hanya berharap pada pemerintah atau dinas terkait untuk datang ke sekolah dan kemudian memberikan informasi tentang asesmen kompetensi minimum.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar". *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.9>
- Aditomo, A., & Köhler, C. (2020). Do Student Ratings Provide Reliable and Valid Information about Teaching Quality at the School Level? Evaluating Measures of Science Teaching in PISA 2015. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*. <https://doi.org/10.1007/s11092-020-09328-6>
- Anas, M., Muchson, M., Sugiono, & Forijati, R. (2021). Pengembangan kemampuan guru ekonomi di Kediri melalui kegiatan Pelatihan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 48–57.
- Anggraeni, A. A. F., & Rachmajanti, S. (2020). The Needs of Continuous Professional Development Perceived by Novice and Experienced Teachers. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 5(11), 1664–1670.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Blazar, D., & Kraft, M. A. (2017). Teacher and Teaching Effects on Students' Attitudes and Behaviors. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 39(1), 146–170. Retrieved from <https://doi.org/10.3102/0162373716670260>
- Ekowati, D. W., Astuti, Y. P., Utami, I. W. P., Mukhlisina, I., & Suwandayani, B. I. (2019). Literasi Numerasi di SD Muhammadiyah. *ELSE (Elementary School Education Journal) : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 3(1), 93. Retrieved from <https://doi.org/10.30651/else.v3i1.2541>
- Izza, A. Z., Falah, M., & Susilawati, S. (2020). Studi Literatur: Problematika Evaluasi Pembelajaran dalam Mencapai Tujuan Pendidikan di Era Merdeka Belajar. *Konferensi Ilmiah Pendidikan Universitas Pekalongan 2020*, 10–15. <https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/kip>
- Jonas, N. (2018). Numeracy Practices and Numeracy Skills among Adults. *OECD Education Working Paper No. 177*, (177). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1787/8f19fc9f-en>
- Manurung, A. S., Hasanah, M., & Siswanto, W. (2020). Instrumen Asesmen Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Membaca Teks Eksposisi untuk Siswa Kelas VIII SMP. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 5(6), 730–736.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *Qualitative Data Analysis (Second Edi)*. London: SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Novarina, Gheanurma Ekahasta; Santoso, A. F. (2019). Model Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 4(11), 1448–1456.
- Prastowo, A. (2015). *Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik Terpadu*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rawung, I. Y. (2019). Strategi Pembelajaran Aktif bagi Guru Sekolah Dasar di SD GKST II Poso Kota Utara. *Jurnal Strategi Pembelajaran*, 1(1), 49–55.
- Rohmad, M. A. (2020). The Authority of Teacher in Merdeka Belajar Discourse. *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 10(2), 43–54.
- Rokhim, D. A., Rahayu, B. N., Alfiah, L. N., Peni, R., Wahyudi, B., Wahyudi, A., Sutomo., & Widarti, H. Y. (2021). Analisis Kesiapan Peserta Didik dan Guru pada Asesmen Nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, Survey Karakter, dan Survey Lingkungan Belajar). *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 4(1), 61–71.
- Rosyidi, U. (2020). Merdeka Belajar: Aplikasinya dalam Manajemen Pendidikan & Pembelajaran di Sekolah. In *Seminar Nasional Pasca Sarjana UNJ*.
- Safitri, I., Marsidin, S., & Subandi, A. (2020). Analisis Kebijakan terkait Kebijakan Literasi Digital di Sekolah Dasar. *EDUKATIF : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 176–180. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.123>
- Setiawan, H., Sa'dijah, C., & Akbar, S. (2017). Pengembangan Instrumen Asesmen Autentik Kompetensi Pada Ranah Keterampilan untuk Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 2(7), 874–882.
- Uno, H. B. (2012). *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wagiran. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasinya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yuliandari, R. N., & Hadi, S. (2020). Implikasi Asesmen Kompetensi Minimum Dan Survei Karakter Terhadap Pengelolaan Pembelajaran SD. *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 5(2).
- Yusuf, M. (2015). *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Zahrudin, M., Ismail, S., & Zakiah, Q. Y. (2021). Policy Analysis of Implementation of Minimum Competency Assessment As An Effort To Improve Reading Literacy of Students in Schools. *Paedagogia : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 12(1), 83–91.